

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam rangka penerapan disiplin pajak, Direktorat Jenderal Pajak membuat program perpajakan setiap tahun yang berlaku bagi seluruh wajib pajak seluruh Indonesia. Fokus perpajakan yang akan diteliti dalam tesis ini ialah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak Notaris yang merupakan salah satu langkah untuk menjabarkan misi yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara secara optimal. Tinjauan Yuridis mengenai Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak Notaris/ PPAT dewasa ini sangat diperlukan dimana pelaksanaan pemungutan pajak oleh Pemerintah dan Pengawasan serta pembinaan terhadap Wajib Pajak dilakukan oleh Petugas dari Direktorat Jenderal Pajak guna melaksanakan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan. Terhadap Wajib Pajak profesi Notaris dan PPAT yang termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP), dilakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakannya untuk menguji kepatuhan mereka dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Adapun jenis penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian normatif yang bersifat analisis kualitatif. Artinya bahwa penelitian ini membahas ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak, membahas data-data yang diperoleh untuk dihubungkan dengan Wajib Pajak serta menghubungkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema Tesis yaitu Pemeriksaan Pajak Terhadap Notaris /PPAT Sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Perundang-undangan dan Penelitian Konseptual mempergunakan legislasi dan regulasi antara aturan dalam suatu undang-undang dan mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum terhadap pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum terhadap permasalahan yang berkenaan dengan penulisan tesis ini. Setiap Wajib Pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan, dapat memberikan motivasi positif untuk masa-masa selanjutnya. Maka, pemeriksaan Pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan terhadap Wajib Pajak dan setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Notaris, dan Peradilan Pajak

ABSTRACT

Tax is one source of state revenue for the implementation and development for the improvement of people's welfare. In order to apply the tax discipline, the Directorate General of Taxes make every year tax program which applies to all taxpayers throughout Indonesia. The focus of taxation to be studied in this thesis is the examination of the taxpayer's tax Notary which is one step to define the mission to be carried out by the tax authorities in collecting *menerimaan optimal state*. Judicial review of Tax Audit of Taxpayers Notary/PPAT today indispensable in which the implementation of tax collection by the Government and Supervision and guidance to the taxpayer conducted by Officers of the Directorate General of Taxation to implement what is contained in the Tax Act. Against Taxpayers Notary and PPAT professions included in the Taxable Person (PKP), conducted an examination of the tax obligation to test their compliance in implementing tax payments.

The type of research that is used, ie normative legal research method. This means that this study discusses the normative provisions relating to tax inspection, discuss the data obtained to be associated with the taxpayer as well as connecting with the existing theories in accordance with the Thesis theme, namely Against Tax Audit Notary / PPAT As Taxable Person.

Techniques used data collecting in Research Legislation and Research Conceptual use legislation and regulation between rules in a law and based on the principle of legal principles against the views of scholars or legal doctrines of the issues regarding the writing of this thesis. Every taxpayer has the same chance to be examined, the level of tax compliance in meeting tax obligations is the main aim of the tax audit, so the taxpayer that the level of compliance is still relatively low, it is expected to do the examination, can provide positive motivation for the later period. Thus, tax inspection also as a mean of providing guidance to the taxpayer and any test results should be communicated to the taxpayer in writing, which is about the things that are different between notification (SPT) Taxpayers with the results of the examination, and then to be taken by the taxpayer .

Keywords : Tax Examine, Taxable Employers, Notary, and Tax Cours.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5268).

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/pj/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [68/PMK.03/2010](#) Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

Surat Edaran

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2014 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2014.

